

## Analisis Demografi dan Kewilayahan Banyuwangi dengan Pendekatan HINCO untuk Pengembangan Wilayah

Kusuma Dewi  
Universitas Negeri Malang  
e-mail: kusuma.dewi.1707216@students.um.ac.id

### *Abstrak*

*Pengembangan wilayah merupakan topik kajian yang kompleks untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Analisis strategi pengembangan wilayah akan mencapai keberhasilan berbagai sektor ekonomi. Analisis HINCO membantu dalam merumuskan kondisi demografis dan kewilayahan suatu daerah untuk mencapai pengembangan wilayah yang baik. Studi kasus dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik yang digunakan yaitu observasi dan studi literatur. Hasil analisis meliputi kajian dari aspek Human (manusia), Institutional (kelembagaan), Natural (alam), Capital (modal), dan Other (aspek lainnya) dari Kabupaten Banyuwangi. Melalui analisis ini maka pengembangan wilayah Banyuwangi akan lebih terencana dan tercapai maksimal dikarenakan memperhatikan aspek demografi dan kewilayahannya.*

*Kata kunci: demografi, kondisi kewilayahan, HINCO, pengembangan wilayah*

### *Abstract*

*Regional development is a complex topic of study to achieve community progress and welfare. Analysis of regional development strategies will achieve success in various economic sectors. HINCO analysis helps in formulating the demographic and regional conditions of an area to achieve good regional development. The case study in this research is Banyuwangi Regency. The research method uses a descriptive qualitative and quantitative approach. The technique used is observation and literature study. The results of the analysis include studies from aspects of Human, Institutional, Natural, Capital, and Other aspects from Banyuwangi Regency. Through this analysis, the development of the Banyuwangi region will be more planned and achieved maximally due to considering the demographic and regional aspects.*

*Keywords: demographics, regional conditions, HINCO, regional development*

## PENDAHULUAN

Pengembangan wilayah merupakan topik kajian yang kompleks untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Penduduk ditempatkan sebagai objek maupun subjek dalam perencanaan pembangunan (Jubaedah, 2020) dan penentu kebijakan (Dina, 2014). Perkembangan penduduk menjadi tolok ukur dalam dinamika pengembangan wilayah. Namun keberadaan kondisi fisik juga menjadi penentu dalam keberhasilan pengembangannya. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah berkedudukan sebagai sumber daya modal dan sumber potensi. Bahkan kondisi fisik dan kegiatan ekonomi lokal menjadi dasar perbedaan kemakmuran setiap wilayah yang berbeda-beda (Ayubi, 2014). Melalui kajian pengembangan wilayah ini maka perencanaan tata guna lahan akan dapat dirumuskan dengan baik (Baja, 2012).

Analisis strategi pengembangan wilayah akan mencapai keberhasilan berbagai sektor ekonomi. Beberapa capaian tersebut seperti pusat-pusat pertumbuhan dapat terklasifikasikan dengan baik (Gulo, 2015; Rahayu, 2014), sektor-sektor unggulan wilayah dapat dipetakan (Hidayat & Darwin, 2017), pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (Ekosafitri et al., 2017), pemberdayaan masyarakat setempat sebagai sumber daya manusia yang ikut andil dalam pengembangan wilayah (Syafa'at et al., 2003) dan lainnya. Dalam hal ini kondisi demografis suatu wilayah perlu dianalisis dengan baik untuk mencapai keberhasilan pembangunan suatu wilayah.

Analisis HINCO membantu dalam merumuskan kondisi demografis dan kewilayahan suatu daerah untuk mencapai pengembangan wilayah yang baik. Analisis HINCO terdiri dari lima aspek meliputi *Human*, *Institutional*, *Natural*, *Capital*, dan *Other* (Sudirman, 2017). Aspek *Human* berarti mengkaji beberapa hal meliputi ukuran populasi dan karakteristik demografi; pendidikan; pola pengeluaran; partisipasi angkatan kerja; kesehatan; perumahan; komunikasi; dan indikator lainnya. Aspek *Institutional* meliputi kajian pemerintah daerah dan kegiatan ekonomi. Aspek *Natural* meliputi penggunaan lahan, jenis tanah, sumber daya air, topografi, asset rekreasi, dan zona rawan bahaya. Aspek *Capital* meliputi transportasi dan komunikasi. Sementara aspek *Other* meliputi rencana dan perencanaan pengembangan di area perdagangan, serta sumber daya energi.

Banyuwangi beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan pengembangan daerah yang signifikan. Pengembangan ini mulai dari sektor pariwisata (Diartho et al., 2020; Fahad & Endrayadi, 2017), perikanan (Wiadnya, 2011), perkebunan (Agustono et al., 2017), pertanian (Fasya, 2016), daerah kepesisiran (Gantara & Achmadi, 2012; Praja et al., 2018), perdagangan dan jasa penginapan (Ayubi, 2014), serta lainnya. Kabupaten ini berada pada lokasi yang strategis yaitu berada di timur ujung Pulau Jawa. Ini menjadi pintu koridor ekonomi bagian timur Pulau Jawa (Ayubi, 2014). Potensi sumber daya manusia di Banyuwangi juga tergolong tinggi. Terlebih lagi, Banyuwangi merupakan kabupaten peringkat pertama dalam kategori terluas di Jawa Timur (Eston et al., 2016; Praja et al., 2018).

Banyak penelitian terkait lainnya namun terbatas pada analisis kependudukan dalam mencapai perekonomian wilayah (Adiputra, 2014; Hasibuan, 2015), untuk pengembangan daerah wisata (Amaliah, 2018; wahyuningtyas et al., 2019), untuk pengembangan ilmu ekonomi dan penentu kebijakan pemerintah (Jubaedah, 2020), pengkajian ketenagakerjaan dalam data kependudukan (Dina, 2014), dan lainnya. Penelitian tersebut belum mengkaji secara terstruktur data demografis dan kewilayahan suatu daerah. Melalui analisis demografi dan kewilayahan dengan pendekatan HINCO ini maka suatu wilayah akan dapat dikembangkan dengan terstruktur dan kompleks. Aspek-aspek baik secara fisik maupun non-fisik akan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Banyuwangi akan dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik sumber daya yang ada didalamnya.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang berarti data dikumpulkan berupa angka dan verbal. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara naratif suatu fenomena yang terjadi. Data kuantitatif ini berarti data yang diperoleh dari sumber literatur diolah sedemikian rupa untuk dianalisis menjadi data verbal.

Teknik yang digunakan yaitu observasi dan studi literatur. Data primer diperoleh melalui tahap observasi. Sementara data sekunder diperoleh melalui tahap kajian studi literatur, yakni pengumpulan data kepustakaan seperti jurnal, buku, website, dan berbagai dokumen pemerintah Banyuwangi yang mengulas tentang demografi dan data kewilayahan. Data pendukung utama dalam menganalisis demografi Banyuwangi yaitu bersumber dari data statistik kependudukan dari laman Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek ini yaitu *Human* (Manusia), *Institutional* (Kelembagaan), *Natural* (Alam), *Capital* (Modal), dan *Other* (Lainnya). Uraian analisis HINCO Banyuwangi sebagai berikut.

### A. *Human Aspect* (Aspek Manusia)

#### a. *Population Size and Demographic Characteristics* (Ukuran Populasi Dan Karakteristik Demografis)

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 bertambah 4.780 jiwa, yaitu dari 1.604.897 jiwa di tahun 2017 menjadi 1.609.677 jiwa di tahun 2018 (Proyeksi Sensus Penduduk, 2010). Sementara luas wilayah sekitar 5.782,5 km<sup>2</sup>, angka kepadatan penduduk tahun 2018 ada sekitar 278 jiwa per km<sup>2</sup>. Berdasarkan komposisi jenis kelamin, seks rasio penduduk di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 sebesar 99 persen. Ini artinya keterbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan berbanding 99 laki-laki dengan 100 perempuan.

Piramida penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 diperoleh bahwa kelompok umur produktif (15-64 tahun) cukup banyak, dengan jumlah 68,4%, sedangkan komposisi penduduk usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun keatas) dengan jumlah 31,6%. Angka *dependency ratio* sebesar 46,19 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung secara ekonomi sebanyak 46 sampai 47 penduduk usia tidak produktif. (Proyeksi Sensus Penduduk, 2010).

#### b. *Education* (Pendidikan)

Secara umum penduduk Banyuwangi yang berumur 7 – 12 tahun ternyata belum seluruhnya berstatus sekolah, ada sekitar 0,22 persen di antara mereka yang *drop out*. Sedangkan untuk penduduk yang berumur 13 – 15 tahun ada 97,22 persen di antaranya berstatus masih sekolah, dan sisanya 2,78 persen berstatus *drop out*. Yang berumur 16 – 18 tahun berstatus masih sekolah sebanyak 77,80 persen, belum bersekolah 0,00 persen dan yang *drop out* ada sebanyak 22,20 persen. (STATDA, 2019)

Diduga sebagai akibat dari rendahnya angka partisipasi sekolah di tingkat SLTP dan SLTA sederajat tersebut, akan berdampak pada indeks pendidikan di Banyuwangi. Pada 2018 indeks pendidikan di Banyuwangi sebesar 0,59 dengan rata-rata lama sekolah selama 7,12 tahun, atau setara dengan kelas 2 SLTP sederajat. Adapun angka harapan lama sekolahnya bagi penduduk Banyuwangi selama 12,69 tahun. Artinya Penduduk Banyuwangi yang berumur  $\geq 7$  tahun akan mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan hingga di bangku kuliah. (STATDA, 2019)

#### c. *Unemployment* (Pengangguran)

Angka pengangguran di Banyuwangi tahun 2018 mencapai 3,67%. Ini berarti setiap 100 penduduk yang membutuhkan pekerjaan atau menjadi pelamar pekerjaan,

96 hingga 97 orang di antaranya dapat terserap sebagai tenaga kerja baru dan 3 hingga 4 orang selebihnya belum mendapat pekerjaan atau berstatus sebagai penganggur. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan tahun 2017 yaitu sebesar 3,07 %. Ini merupakan sebuah penurunan kinerja di bidang ketenagakerjaan.

Angka pengangguran sebesar 3,67 persen tersebut akan sama dengan 33.114 penduduk Kabupaten Banyuwangi yang berumur  $\geq 15$  tahun dengan status penganggur yang terdiri dari pernah bekerja ada 25.295 jiwa dan tidak pernah bekerja ada 7.819 jiwa. Adapun banyaknya penduduk berumur  $\geq 15$  tahun yang bekerja ada sekitar 870.242 jiwa atau ada sekitar 96,33 persen. Apabila dipisah menurut jenis kelamin, laki-laki penganggur ada 20.103 jiwa dan perempuan ada 13.011 jiwa. (STADA, 2019)

d. *Health* (Kesehatan)

Indeks kesehatan Banyuwangi tahun 2011 ke 2012 mengalami kenaikan yaitu dari 0,76 menjadi 0,77. Ini berarti terdapat keberhasilan program kesehatan yang dijalankan selama tahun 2011 ke 2012. Sementara tahun 2013 sampai dengan 2018, indeks kesehatannya stagnan (STADA, 2019). Melihat indeks kesehatan yang demikian, maka kinerja bidang kesehatan perlu ditingkatkan dan membutuhkan inovasi yang berkelanjutan.

Umur harapan hidup penduduk Banyuwangi pada tahun 2018 mencapai 70 tahun 4 bulan, meningkat secara signifikan dari tahun 2010. Perlu diketahui bahwa keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan kerap menggunakan umur harapan hidup sebagai indikator utama sebagaimana yang digunakan oleh UNDP. Peningkatan umur harapan hidup dari tahun 2010 hingga 2018 yang relatif lambat, kinerja di bidang kesehatan ini bisa diklasifikasikan sebagai kemajuan Banyuwangi meskipun pun berjalan lambat. (STATDA, 2019)

e. *Housing* (Perumahan)

Morfologi Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi tiga wilayah yaitu daerah daratan tinggi, daratan rendah, dan daerah pantai. Morfologi tersebut mempengaruhi pemukiman masyarakat. Selain itu sumber bahan pangan, aksesibilitas, kekeluargaan, ataupun sarana prasarana juga menentukan pemukiman masyarakat Banyuwangi. Pola pemukiman memanjang disepanjang garis pantai, jalan, dan sungai. Fenomena pola memanjang juga ditemui pada wilayah umumnya. Selanjutnya pemukiman mengelompok juga ditemui dikarenakan memusat pada keterdapatn sarana prasarana (seperti pada pusat Kecamatan Banyuwangi), aspek kekeluargaan (seperti pada Kawasan Osing), keberadaan sumber mata air, dan ketersediaan sumber pangan.

B. *Institutional Aspect* (Aspek Kelembagaan)

a. *Regional and Local Governments* (Pemerintah Regional dan Lokal)

Wilayah administrasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 memiliki sejumlah 25 kecamatan, 217 kelurahan dan desa, 836 lingkungan dan dusun, serta sebanyak 3.011 RW dan 10.475 RT. Apabila dihitung secara rata-rata dari 836 lingkungan dan dusun, maka akan diperoleh 3 hingga 4 lingkungan dan dusun di setiap kelurahan dan desa, 3 hingga 4 RW di setiap lingkungan dan dusun, serta 3 hingga 4 RT di setiap RW. (STATDA, 2019)

Kecamatan Banyuwangi masih menempati urutan pertama dalam jumlah kelurahan dan desa, yaitu ada sebanyak 18 kelurahan. Diikuti Kecamatan Kabat dengan 14 desa. Adapun Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, dan Genteng adalah tiga kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit, yaitu sebanyak 5 desa. Untuk Kecamatan Blimbingsari merupakan kecamatan yang baru dibentuk pada tahun 2017 dengan jumlah desa sebanyak 10 desa yang diperoleh dari Kecamatan Rogojampi sebanyak 8 desa dan 2 desa dari Kecamatan Kabat. Jumlah desa dan kelurahan di kabupaten Banyuwangi di tahun 2018 yaitu 217. (STATDA, 2019)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejumlah 11.347 orang pada tahun 2018 pada tahun 2018. Komposisi pegawai perempuan sebanyak 4.731 dan pegawai laki-laki sebanyak 5.616 orang. Komposisi perbandingannya yaitu 10 pegawai perempuan dibanding dengan 12 pegawai laki-laki. Sementara dari segi pendidikan, 62,45% pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana (S1), selanjutnya 20,60% pegawai berpendidikan SLTA, dan 12,50% berpendidikan Diploma (STATDA, 2019)

b. *Economic Activity Mix Characteristics* (Karakteristik Campuran Kegiatan Ekonomi)

1. Potensi Ekonomi.

Kawasan pertama yaitu Banyuwangi bagian selatan, tepatnya Kecamatan Genteng hingga Pesanggaran (kawasan Mataraman). Mayoritas penduduknya beretnis Jawa. Perdagangan merupakan sektor unggulan, tepatnya di Kecamatan Genteng dan Gambiran. Peluang usaha jasa penginapan seperti hotel sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pelaku usaha dan para eksekutif perbankan yang kerap melakukan perjalanan bisnisnya ke Genteng, tentunya membutuhkan jasa penginapan.

Sektor perdagangan juga terpusat di Kecamatan Banyuwangi. Perkembangan usaha perdagangan pada skala UMB sudah pada posisi titik jenuh. Artinya ketika dibuka fasilitas perdagangan baru yang berupa *departement store*, atau supermarket akan mempunyai kecenderungan untuk diikuti dengan tutupnya *department store* atau supermarket yang lama. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di sekitar Kecamatan Banyuwangi relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan kawasan Mataraman.

Sementara wilayah utara, timur dan sebagian wilayah barat bagian selatan Kabupaten Banyuwangi. Wilayah ini tepatnya di Kecamatan Wongsorejo, Muncar, Kalibaru, dan Glenmore sebagai spasial ketiga (kawasan Madura), mayoritas penduduknya beretnis Madura. Kawasan ini mempunyai potensi ekonomi lokal yang cukup beragam. Di antaranya adalah subsektor hortikultura, palawija, perikanan, dan perkebunan.

Sub sektor Hortikultura dan Palawija banyak ditemui di Kecamatan Wongsorejo. Terdapat peluang besar bagi pelaku usaha yang mendirikan gudang penampung hasil produksi hortikultura dan palawija. Selanjutnya dapat dipasok ke industri pengolahan yang berada di dalam atau luar kawasan Madura. Khusus untuk potensi perikanan hanya ada di Kecamatan Muncar. Di kecamatan ini sudah banyak berdiri industri pengalengan ikan dan pakan ternak. Sementara perkebunan yang ada di Kecamatan Kalibaru dan Glenmore memiliki peluang yang relatif kecil apabila akan didirikan usaha baru.

Potensi produk tanaman hortikultura juga berada di Kecamatan Bangorejo dan sekitarnya. Kawasan ini membutuhkan adanya industri pengolahan tanaman hortikultura, agar ketika panen produk tanaman hortikultura yang melimpah bisa diolah pada industri pengolahan tersebut. Selanjutnya perlu ada bimbingan teknis dari dinas terkait kepada warga setempat, untuk dibimbing menjadi pengrajin olahan pangan dengan bahan baku produk tanaman hortikultura.

Sementara potensi pertanian padi terdapat di beberapa wilayah di Banyuwangi. Kawasan lumbung padi di Banyuwangi adalah Banyuwangi bagian barat mulai dari Kecamatan Singojuruh hingga ke Kecamatan Banyuwangi. Mayoritas penduduknya suku asli Banyuwangi (Suku Osing/Kawasan Osing). Industri pengolahan padi (selep) banyak ditemui di kawasan ini dikarenakan petaninya dapat dua - tiga kali dalam setahunnya untuk menanam padi.

## 2. Pertumbuhan ekonomi

Data statistik Banyuwangi berada pada peringkat ketiga sebagai lumbung pangan Jawa Timur setelah Kabupaten Jember dan Malang (Ayubi, 2014). Ini menjadi sektor unggulan daerah Banyuwangi. Namun pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sangat rendah. Pertumbuhan ekonominya dapat lebih cepat dari angka 6 persen (STATDA, 2019). Terhambatnya pertumbuhan ini dikarenakan produksi padi menjadi tolok ukur utama ketika digunakan dalam menghitung angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Banyuwangi yang produksinya menurun. Terlebih lagi jika dibandingkan tahun dasar 2010 dengan kondisi lebih rendah dari tahun dasar, maka pertumbuhan sektor pertanian akan turun. Selain itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum.

Selain kategori pertanian, kategori perdagangan berada di urutan kedua dan disusul oleh kategori konstruksi di urutan ketiga dalam pertumbuhan ekonomi Banyuwangi. Sehingga jika dilakukan upaya percepatan ekonomi, maka dapat difokuskan pada bidang pertanian, perdagangan dan konstruksi. Namun bukan berarti program pembangunan yang sudah dicapai selama ini selain pertanian, perdagangan dan konstruksi dikesampingkan. Program pembangunan lainnya harus tetap berjalan untuk mendukung perkembangan ekonomi.

### C. *Natural Aspect* (Aspek Alam)

#### a. *Landuse Patterns* (Pola Penggunaan Lahan)

Banyuwangi memiliki berbagai penggunaan lahan yang bervariasi. Diantaranya yaitu daratan tinggi (yang menghasilkan tanaman perkebunan). Sementara daerah dataran rendah merupakan daerah penghasil tanaman pangan seperti padi dan jagung. Selanjutnya daerah pesisir merupakan daerah yang menghasilkan produk perikanan. Banyuwangi merupakan kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah terbesar (Eston et al., 2016; Praja et al., 2018) yaitu 578.250 Ha dengan berbagai jenis penggunaan lahannya. Pertama, lahan tidak terbangun di Banyuwangi yaitu: hutan, hutan bakau, tambak, padang rumput, pasir, perkebunan, sawah irigasi, sawah tadah hujan, semak belukar, tanah berbatu, ladang, rawa dan tanggul pasir. Kedua, lahan terbangun di Banyuwangi meliputi: permukiman, fasilitas dan industri. Penggunaan lahan terbesar yaitu kawasan hutan sebesar 183.396,34 Ha dan permukiman terbangun dengan luas 125.240,95 Ha.

#### b. *Soil Types* (Jenis Tanah)

Kondisi geologi setiap wilayah Banyuwangi bervariasi. Berdasarkan struktur geologi, luas tanah di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar merupakan hasil Gunung Api Kwarter Muda seluas 170.310,5 Ha (30%) dan Aluvium seluas 134.525 Ha (23%) yang berupa tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan. Selanjutnya, Miosen false semen seluas 89.177,3 Ha (16%), Miosen false batu gamping seluas 77.536,5 Ha (13%), hasil Gunung Api Kwarter tua dengan luas 59.283 Ha (10%) dan struktur geologi Andesit merupakan struktur geologi terendah dengan luas hanya sebesar 8% (47.417,8 Ha). (RTRW Banyuwangi Tahun 2012-2032)

Jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari regosol, litosol, latosol, podsolik dan gambut. Jenis tanah untuk Kabupaten Banyuwangi terluas adalah jenis tanah Podsolik dengan luas 348.684,75 Ha (60,4% dari luas area total), jenis tanah Regosol 24%, Lithosol 6,8%, Gambut 6,5% dan Lathosol hanya 2,4% dari luas area di Kabupaten Banyuwangi ([banyuwangikab.go.id](http://banyuwangikab.go.id)).

Jenis tanah yang berbeda-beda tersebar diberbagai wilayah Banyuwangi diantaranya: tanah regosol yang terdapat pada Kecamatan Glenmore, Gambiran, Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Purwoharjo, Bangorejo, Cluring, Muncar, dan Tegaldlimo. Selanjutnya tanah lithosol yang terdapat pada Kecamatan Glenmore, Kalibaru, dan Pesanggaran. Selanjutnya tanah lathosol yang terdapat pada Kecamatan Purwoharjo dan Tegaldlimo. Selanjutnya tanah podsolik yang terdapat pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali wilayah Kecamatan Cluring, Purwoharjo dan Muncar. Ketiga kecamatan tersebut hanya memiliki sebagian kecil tanah podsolik.

c. *Water Resources* (Sumber Air)

Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km. Terdapat sungai dan DAS di Banyuwangi yang menjadi sumber air masyarakat. Banyuwangi memiliki beberapa sungai besar dan kecil. Jumlah sungai di Banyuwangi sebanyak 17 buah yang melewati diberbagai kecamatan. Sungai ini meliputi Kali Baru, Wagud, Bargi, Karangtambak, Barumanis, Probolinggo, Setail, Bomo, Bajulmati, Binau, Sobo, Tambong, Pakis, Bendo, Ketapang, Sukowidi, dan Selogiri (Banyuwangi Dalam Angka Tahun, 2012). Banyuwangi memiliki 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah.

d. *Topographic Features* (Fitur Topografi)

Bagian barat dan utara pada Banyuwangi memiliki morfologi pegunungan (dengan curah hujan tinggi dan kemiringan rata-rata 40°). Sementara bagian selatan termasuk daerah dataran rendah (curah hujan cukup dan kemiringan kurang dari 15°). Rata-rata curah hujan cukup ini dapat mengelola tingkat kesuburan tanah ([banyuwangikab.go.id](http://banyuwangikab.go.id)). Dataran rendah yang luas dari selatan hingga utara memiliki banyak sungai (baik sungai kecil maupun sungai besar) yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Banyuwangi tercatat memiliki 35 DAS, sehingga dapat mengairi banyaknya sawah masyarakat dan membantu peningkatan kesuburan tanah.

e. *Recreation Assets*, (Aset Rekreasi)

Banyuwangi memiliki potensi pariwisata yang tinggi namun belum dikembangkan secara optimal. Ini salah satu kabupaten yang berpotensi tinggi dalam sektor pariwisata di Jawa Timur. Banyuwangi memiliki pesona alam yang indah baik

dari kenampakan pantai, pegunungan, air terjun, maupun kenampakan lainnya. Tidak hanya dari segi alam yang berpotensi dijadikan sebagai destinasi wisata, namun adanya budaya masyarakat Banyuwangi juga memiliki potensi yang tinggi (seperti halnya kampung adat Osing).

Banyuwangi memiliki 5 kategori DTW (Daya Tarik Wisata) yaitu Alam (seperti Pegunungan Ijen dan Baluran), Perkebunan (perkebunan di Kecamatan Kalibaru dan Licin), Wisata Binaan (wisata pemandian dan buatan lainnya), Wisata Religi (seperti pura-pura di daerah Alas Purwo dan makam-makam tokoh religi), Wisata Budaya (seperti Kampung Osing). Selanjutnya juga memiliki DTW Minat Khusus atau Buatan Manusia. Berdasarkan data Daya Tarik Wisata dalam dokumen Kabupaten, dari 24 Kecamatan yang ada hanya 17 Kecamatan yang terdaftar memiliki obyek wisata.

Banyuwangi memiliki obyek wisata andalan yang dikenal sebagai Segitiga Berlian (*Diamond Triangle*). Segitiga Berlian ini menghubungkan Kawah Ijen, Pantai Plengkung serta Pantai Sukamade yang masing-masing memiliki daya tarik wisata khas dan memiliki pengalaman berkesan tersendiri. Destinasi ini sudah dikenal oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

f. *Hazard-Prone Zone* (Zona Rawan Bahaya)

Zona rawan bahaya Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi beberapa dimana risiko kebencanaannya yaitu gelombang tinggi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, kekeringan, letusan gunung berapi, serta kebakaran. Hal ini dipengaruhi oleh letak Banyuwangi, perilaku manusia, dan faktor gabungan keduanya. Zona tanah longsor, gunung berapi, dan gempa sering dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah lereng. Sedangkan gelombang tinggi dan tsunami ini berada di sebelah timur dan selatan (pantai yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan Selat Bali). Selanjutnya zona kekeringan dan kebakaran dapat terjadi karena kondisi hidrometeorologi. Kawasan rawan bencana ini seperti daerah-daerah yang memiliki vegetasi rumput (daerah Taman Nasional Baluran).

D. *Capital Aspect* (Aspek Modal)

Sistem transportasi di Banyuwangi terdiri dari beberapa moda yaitu transportasi laut, kereta api, jalan raya, dan udara. Pola pergerakan dari sistem transportasi Banyuwangi terbagi menjadi 2 yaitu secara regional (berdasarkan posisi Banyuwangi dengan jalur menuju Bali). Selanjutnya secara antar wilayah (berdasarkan lingkup kabupaten yaitu pergerakan antar kecamatan dan kecamatan dengan ibukota kabupaten).

1. Jaringan Jalan

Sistem jaringan primer (jalan utama) di Banyuwangi yaitu sepanjang ruas jalan yang menghubungkan Surabaya–Jember–Banyuwangi. Jaringan primer ini merupakan penghubung lalu lintas regional dan lokal. Progam pembangunan jalan lintas selatan (JLS) Banyuwangi telah berlangsung sejak 2002. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusung program kerja konstruksi jalan, jembatan, dan drainase pada ruas jalan arteri. Sementara pemerintah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan sosialisasi program pembangunan JLS, pembebasan lahan, pembangunan dan peningkatan jalan kolektor lintas selatan serta menyusun program strategis yang mendukung pembangunan JLS.

Pembangunan JLS di Banyuwangi dibagi menjadi dua yaitu ruas jalan kolektor (penghubung ruas jalan arteri/jalan sirip) dan ruas jalan arteri (jalan utama). Kebutuhan jalan arteri sepanjang 74,3 km, ini menghubungkan Kabupaten Jember dengan Banyuwangi. Jalan ini terdiri dari ruas jalan: Banyuwangi – Rogojampi, Rogojampi – Genteng, Genteng – Glenmore, Glenmore – Kendeng Lembu, Kendeng Lembu – Malangsari, dan Malangsari – Tangki Nol.

## 2. Angkutan Umum

Banyuwangi dilalui jalur lokal dan regional. Jalur regional utama di Banyuwangi dibagi menjadi 2 yaitu jalur Jember – Banyuwangi (rute yang cukup padat) dan jalur Surabaya – Situbondo – Banyuwangi. Sementara jalur lokal ini menghubungkan antar wilayah di dalam Kabupaten Banyuwangi (bus kecil, bus sedang, bus besar dan MPU). Jumlah terminal angkutan umum di Banyuwangi ada 8 sebagai berikut: Terminal Brawijaya (Kec. Banyuwangi), Terminal Rogojampi di (Kec Rogojampi), Terminal Sasak Perot (Kec. Giri), Terminal Sri Tanjung (Kec. Kalipuro), Terminal Blambangan (Kec. Banyuwangi), Terminal Gambiran (Kec. Gambiran), Terminal Genteng (Kec. Genteng), dan Terminal Muncar (Kec. Muncar).

## 3. Transportasi Darat (Kereta Api)

Wilayah Banyuwangi memiliki jalur transportasi kereta api. Jalur transportasi ini membelah dua bagian, tepat membagi tengah wilayah Banyuwangi. Jalur kereta api Banyuwangi dibagi menjadi beberapa jalur yaitu jember, Probolinggo, Malang, Nganjuk, dan Madiun. Pelayanan kereta api Banyuwangi dibagi menjadi kelas ekonomi dan eksekutif. Terdapat 2 (dua) kategori Stasiun Kereta Api yaitu stasiun kelas I dan kelas II. Stasiun kelas I yaitu Stasiun Kereta Api Banyuwangi. Sedangkan stasiun kelas II yaitu Stasiun Karangasem, Stasiun Rogojampi, Stasiun Kalisetail, Stasiun Kalibaru, dan Stasiun Temuguruh.

## 4. Transportasi Laut

Pelabuhan laut utama di Banyuwangi terdiri dari 2 tempat yaitu Pelabuhan Tanjung Wangi (pelayanan bongkar muat barang untuk perdagangan) dan Pelabuhan Meneng atau Ketapang (pelayanan untuk penyeberangan Ketapang-Gilimanuk). Pelabuhan Tanjung Wangi ditetapkan sebagai pelabuhan kelas II yang memiliki arus penumpang cenderung menurun disetiap tahunnya. Hal ini dikarenakan fungsinya pada aktivitas bongkar muat barang. Sementara Pelabuhan Meneng memiliki arus penumpang yang cenderung meningkat disetiap tahunnya. Hal ini dikarenakan tingginya minat masyarakat yang menggunakan jalur darat menuju Pulau Bali.

## 5. Transportasi Udara

Banyuwangi mengupayakan pembangunan jalur transportasi udara sebagai asset untuk pembangunan daerah. Pembangunan bandar udara Banyuwangi sejalan dengan program peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada perkembangan daerah. Pembangunan ini juga sebagai upaya untuk mendukung pergerakan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Lokasi pembangunan bandar udara ini dekat dengan pusat kota Banyuwangi yaitu dengan jarak kurang lebih 15 km (ketinggian  $\pm$  20 – 30 mdpl, topografi datar, kemiringan  $\leq$  1%). Lokasi bandar udara secara administrative terletak di Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi. Bandar Udara Blimbingsari hanya melayani pesawat kecil (perintis) seperti jenis Pesawat

Cessna. Hal ini dikarenakan pembangunan fasilitas bandara yang belum sepenuhnya berjalan sehingga untuk pesawat komersial besar bermesin ganda tidak dapat dilayani.

E. *Other Aspect* (Aspek Lainnya)

a. *Development Plans and Planning at Higher and Lower Level Trade Areas* (Rencana dan Perencanaan Pengembangan Di Area Perdagangan Tingkat Tinggi dan Rendah)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 telah dicanangkan oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Selanjutnya Pemkab Banyuwangi melakukan perubahan RPJMD tersebut. Hal ini dikarenakan target kinerja telah tuntas sejak tahun 2017. Terdapat tiga hal yang menyebabkan perubahan tersebut, yaitu penyesuaian regulasi RPJMD, hasil evaluasi yang telah tercapai, adanya prioritas dan arah pembangunan baru yang berimplikasi pada desain kelembagaan.

Target kinerja RPJMD yang telah terlampaui tahun 2018 antara lain 70,03% persentase dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berarti telah tercapai dari target RPJMD sebesar 68,31%. Selanjutnya 7,8% angka kemiskinan tercapai, angka ini sedikit lebih rendah dari tujuan target yaitu sebesar 8,55%. Sementara 90,72% ini tercapai dari Indeks Pembangunan gender, persentase ini melampaui targetnya yaitu sebesar 85,86%. Selanjutnya capaian 80,08% Indeks Kepuasan Masyarakat, angka ini berarti telah melampaui dari targetnya yakni sebesar 79,23%.

Selain penyelesaian target kinerja, munculnya isu-isu baru yang *urgent* untuk dituntaskan hingga akhir periode 2021 mendorong perubahan RPJMD. Revisi RPJMD berupaya untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian nasional dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global. Upaya peningkatan perekonomian ini seperti pengembangan pariwisata. Program yang dibuat mendorong setiap dinas untuk menjadi dinas pariwisata, setiap tempat dijadikan destinasi dan setiap aktivitas dijadikan atraksi. Program Banyuwangi mengupayakan seluruh desa dapat menjadi desa kreatif.

RPJMD juga mengupayakan program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. Penurunan angka kemiskinan di Banyuwangi (dengan laju penurunan rata-rata 4,1%) menjadi rujukan provinsi dan nasional. Angka kemiskinan tahun 2018, berkisar pada 7,8%. Keberhasilan tersebut menjadi dorongan untuk pemerintah Banyuwangi melakukan berbagai inovasi di sektor pembangunan lainnya. Banyuwangi terus menggalakan program untuk menghasilkan inovasi seperti UGD kemiskinan, pengembangan sektor UMKM, pelibatan CSR, rantang kasih, dan prioritas lainnya.

Program RPJMD selanjutnya yaitu menyoroti bidang pelayanan. Perubahan RPJMD berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan. Bentuk implementasi dari program tersebut yaitu melalui pengubahan *mindset* para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan. Pemerintah memberikan sosialisasi dan pelatihan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. ASN diharapkan dapat menerapkan konsep sikap (menjadi pribadi yang dapat meningkatkan kualitas diri) yang ditulis oleh Daniel H. Pink dalam "*A Whole New Mind*".

b. *Energy Resources* (Sumber Daya Energi)

Sumber daya energi Kabupaten Banyuwangi telah tertuang dalam RTRW 2012-2032. Banyuwangi memiliki sumber daya listrik dan gas. Terdapat strategi

pengembangan energi alternatif yaitu meliputi tiga hal sebagai berikut: 1) sumber energi tenaga hidro terdapat pada 7 kecamatan yaitu: Songgon, Glenmore, Licin, Kalibaru, Wongsorejo, Kalipuro, dan Pesanggaran; 2) sumber energi tenaga surya terdapat pada 2 kecamatan yaitu: Kalipuro dan Wongsorejo; 3) sumber energi biomassa terdapat pada 3 kecamatan yaitu: Glenmore, Kalipuro, dan Kalibaru

## KESIMPULAN

Kajian demografi dan kewilayahan Kabupaten Banyuwangi dilihat dari aspek-aspek HINCO. Pertama, kajian dari aspek *Human* (manusia) meninjau masyarakat Banyuwangi pada tahun 2018 dari segi populasi dan karakteristik demografi, pendidikan, angka pengangguran, kesehatan, dan kondisi perumahan. Kedua, *Institutional* (kelembagaan) dikaji dari kondisi pemerintah regional dan lokal serta kegiatan ekonomi. Ketiga, *Natural* (alam) ditinjau dari penggunaan lahan, jenis tanah, sumber air, topografi, aset rekreasi, dan daerah rawan bencana. Keempat, *Capital* (modal) meliputi aspek transportasi. Kelima, *Other* (aspek lainnya) dari Kabupaten Banyuwangi meliputi kajian perencanaan dan pengembangan area perdagangan serta sumber daya energi. Melalui analisis ini maka pengembangan wilayah Banyuwangi akan lebih terencana dan tercapai maksimal dikarenakan memperhatikan aspek demografi dan kewilayahannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk berbagai pihak yang ikut serta dalam pengumpulan data sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini khusus untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan dosen pembimbing Universitas Negeri Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, E. (2014). Analisis Kependudukan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, 7(1), 68-77.
- Agustono, B., Lamid, M., Ma'ruf, A., & Purnama, M. T. E. (2017). Identifikasi limbah pertanian dan perkebunan sebagai bahan pakan inkonvensional di Banyuwangi. *Jurnal Medik Veteriner*, 1(1), 12-22.
- Amaliah, W. (2018). Analisis Kependudukan di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Resolusi Konflik, CSR dan Pemberdayaan (CARE)*, 3(1).
- Ayubi, A. A. (2014). Analisis potensi ekonomi kabupaten banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 1-15.
- Baja, I. S. (2012). *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah*. Penerbit Andi.
- Bapeda Banyuwangikabgo.id. Dokumen Laporan Akhir Penysunan Sistem Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Banyuwangi Tahun 2013.
- BPS Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2012
- BPS Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2013
- BPS Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2014
- BPS Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2015
- BPS Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2016
- BPS Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2017
- BPS Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2018

- Diartho, H. C., Lestari, E. K., Yunitasari, D., Lutfi, A., & Muslihatinningsih, F. (2020). Perencanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi di Bagian Selatan Provinsi Jawa Timur (Studi: Kabupaten Banyuwangi). *Media Trend*, 15(1), 62-73.
- Dina, F. (2014). Analisis Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2014. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi*, 1(1).
- Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E., & Yulianda, F. (2017). Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 1(2), 145-157.
- Eston, A., Hananto, U. D., & Soemarmi, A. (2016). Pengelolaan Potensi Pariwisata dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Banyuwangi Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-11.
- Fahad, H. A., & Endrayadi, E. C. (2017). Pengembangan sektor pariwisata di kabupaten Banyuwangi tahun 2002-2013. *Publika Budaya*, 5(1), 28-35.
- Fasya, A. H. (2016). Studi Perancangan Teknologi Informasi Pada Bidang Pertanian Dengan Konsep "Sawah Digital" di Kabupaten Banyuwangi. *ReTII*.
- Gantara, W. P., & Achmadi, T. (2012). Model Pengembangan Wilayah Untuk Pembangunan Pelabuhan: Studi Kasus Pantai Selatan Jawa Timur. *Jurnal Teknik ITS*, 1(1), E1-E6.
- Gulo, Y. (2015). Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Pendukungnya Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias Identification of Growth and Hinterland Area in Developing Nias District. *Widyariset*, 18(1), 37-48.
- Hasibuan, L. S. (2015). Pengaruh faktor-faktor kependudukan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(1).
- Hidayat, M., & Darwin, R. (2017). Analisis Sektor Unggulan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. *Media Trend*, 12(2), 156-167.
- Jubaedah, E. (2020). Analisis Kependudukan Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Industri Elektro dan Penerbangan*, 8(1).
- Laman Profil Kabupaten Banyuwangi. (Online), Retrieved from: (<https://www.banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html>)
- Laman Jatimprov.go.id. Profil Kabupaten Banyuwangi. (Online), Retrieved from: (<http://pertanian.jatimprov.go.id/index.php/komoditas/sentra-hortikultura/4-kab-banyuwangi>)
- Praja, R. N., Yudhana, A., & Haditanojo, W. (2018). Isolasi dan Identifikasi Jamur pada Cangkang Telur Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*) Gagal Menetas di Pantai Boom Banyuwangi. *Surabaya. J. Med. Vet*, 1(2), 11-15.
- Rahayu, E. (2014). *Penentuan pusat-pusat pertumbuhan dalam pengembangan wilayah di kabupaten Gunungkidul* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032
- STATDA. (2019). *Statistika Daerah Kabupaten Banyuwangi 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

- Sudirman, H. (2017). SCOPE OF SPATIAL / REGIONAL ANALYSIS. Retrieved from: <https://docplayer.info/45977474-Scope-of-spatial-regional-analysis-bruce-mitchell-1998-gambar-faktor-faktor-pembentuk-struktur-wilayah.html>
- Syafa'at, N., Simatupang, P., Mardianto, S., & Pranadji, T. (2003, July). Konsep pengembangan wilayah berbasis agribisnis dalam rangka pemberdayaan petani. In *Forum penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 21, No. 1, pp. 26-43).
- Wahyuningtyas, N., Tanjung, A., Idris, I., & Dewi, K. (2019). Disaster mitigation on cultural tourism in Lombok, Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 27(4), 1227-1235.
- Wiadnya, D. G. R. (2011, November). Konsep Perencanaan Minapolitan Dalam Pengembangan Wilayah. In *Makalah Workshop Penyiapan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang di Kabupaten Tematik tanggal* (pp. 22-23).